

TAJUK RENCANA

Peran Strategis Media Saat Pandemi

WAPRES Ma'rif Amin menya-
ngkan masih ada media dan jurnalis yang mengabaikan kode etik jurnalistik dalam menampilkan berita demi meraih umpan klik atau *click bait*. Berita tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian publik, namun isi beritanya tanpa didukung verifikasi dan fakta. Pernyataan ini disampaikan Wapres dalam acara yang digelar PWI secara virtual Sabtu (24/7) bertajuk ePWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit (KR 25/7).

Kita tak menampik pernyataan Wapres, karena dalam kenyataannya memang ada media yang demikian. Namun, tidak semua media, apalagi media mainstream, berperilaku seperti digambarkan Wapres yang hanya mengejar klik dan mengabaikan verifikasi. Padahal, kita tahu, elemen penting dalam jurnalisme adalah disiplin melakukan verifikasi, sebagaimana ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya Sembilan Elemen Jurnalisme.

Paling tidak, sinyalemen Wapres bisa menjadi masukan bagi kalangan pers untuk lebih berhati-hati dalam memuat berita, apalagi pada masa pandemi Covid-19. Justru pada saat seperti inilah pers lebih memainkan peran strategis untuk memberi informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pers bukan hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, melainkan juga kepada publik. Sebab, pers bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan publik.

Berkaitan peran itu, pers wajib mengawal kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers juga perlu menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah terkait kebijakan apapun, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Bah-

kan, Wapres mengakui pada masa pandemi ini wartawan menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat tentang penanganan Covid-19, mulai dari edukasi mengenai pentingnya disiplin penerapan prokes, pelaksanaan PPKM, vaksinasi hingga pelayanan kesehatan.

Dalam konteks tersebut kita perlu mengingatkan pentingnya literasi media kepada masyarakat. Ini berkaitan dengan ajakan sejumlah pihak untuk tidak membaca berita Covid-19 yang kemudian ramai di media sosial. Kampanye ajakan tidak membaca berita Covid-19 sungguh sangat *absurd* dan justru mengingkari fitrah manusia yang merupakan hak yang sangat mendasar, yakni hak untuk mengetahui (*right to know*). Justru dengan membaca itulah masyarakat akan tahu apa yang ada di sekitar dirinya, termasuk seputar Covid-19, bagaimana penanganannya, bagaimana cara menghindari dan mengatasinya dan sebagainya. Semua pengetahuan itu diperoleh dengan membaca berita.

Masyarakat kita juga sangat cerdas untuk memilih berita, mana yang hoaks dan bukan. Mereka tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang berseliweran di media sosial (medsos) yang belum dijamin kebenarannya. Karena itu, kehadiran media mainstream seperti SKH *Kedaulatan Rakyat* tentu sangat penting menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menemukan kebenaran. Atau bisa diibaratkan media mainstream menjadi rumah penjernih (*clearing house*) dari beragam informasi yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini kita tentu sepakat dengan Wapres bahwa wartawan harus menaati kode etik jurnalistik sehingga berita yang dihasilkan akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. □

PANDEMI COVID-19 semakin menegaskan pentingnya refleksi dan tata ulang pendidikan kita. Sulitnya membangun kedisiplinan pada protokol Kesehatan (prokes) serta kepedulian pada kesehatan dan keselamatan sesama, menunjukkan tantangan besar dunia pendidikan dalam membangun karakter.

Yang mencolok adalah kesenjangan dan disparitas respons masyarakat atas kebijakan penanganan pandemi. Kondisi sosial-ekonomi yang beraneka ragam tentu saja menjadi faktor yang berpengaruh. Namun, pendidikan mestinya dapat mencetak warga negara yang dalam situasi ini secara bersama-sama berwatak konstruktif agar pandemi segera berakhir untuk kepentingan semua.

Dengan demikian, dibutuhkan refleksi untuk menata ulang kebijakan pendidikan. Salah satu soal utama adalah sentralisme kebijakan pendidikan. Ukuran wilayah dan keragaman Indonesia seharusnya direspons dengan kebijakan yang tidak sentralistik.

Kebijakan BOS

Beberapa aspek lebih teknis dapat dijadikan pelajaran. Pertama, kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara pandang sentralisme dapat melembagakan ketidakadilan. Satu dekade penulis mengajar di Kalimantan Utara, terasa sekali kesenjangan 'nilai' BOS yang besarnya sama antara disana dengan di Jawa.

Untuk menjangkau wilayah Krayan, salah satu pulau di Kabupaten Nunukan Kaltara, transportasi yang tersedia hanya transportasi udara itupun hanya tiga kali selama sepekan dari Nunukan, ibukota Kabupaten. Itupun sudah kemajuan dibandingkan dengan sebelum ada subsidi daerah. Transportasi Krayan-Nunukan PP hanya sekali sepekan. Di Krayan, secara umum harga-harga bisa lima kali lebih mahal dibandingkan di Jawa.

Di daerah-daerah dengan kondisi demikian, maka implementasi kebijakan yang sentralistik, seragam, 'standar-Jakarta', hampir pasti tidak dapat terimplementasikan secara efektif. Problema yang akan muncul tidak hanya yang berakar dari perbedaan harga atau tingkat

Suharno

kemahalan. Tetapi banyak faktor lain seperti perbedaan ketersediaan sumber daya manusia daerah, kesenjangan infrastruktur antar daerah, juga menjadi variabel yang harus diperhatikan bagi perumus kebijakan di bidang pendidikan.

Kedua, masalah ketidakmerataan sebaran guru dan sekolah. Menyerahkan urusan sepenuhnya ke pusat menyulitkan distribusi pendidikan sesuai dengan keragaman kondisi daerah. Menyerah-



KR-JOKO SANTOSO

kan urusan sepenuhnya ke daerah menyulitkan mobilisasi sumber daya untuk dipindahkan dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan. Untuk itu kita sebenarnya bisa meniru beberapa negara maju, seperti model Rusia, yang menerapkan desentralisasi secara parsial. Untuk urusan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan hal-hal fisik bisa diserahkan ke daerah. Adapun untuk urusan kurikulum dan guru masih menjadi urusan pusat.

Pemerintah mesti mengadopsi kebijakan asimetris di bidang pendidikan. Penulis sepakat dengan Yudi Latif (2020) mengenai beberapa prinsip umum kebijakan pendidikan daerah dengan rasio ke-

cukupan, sebaran, dan mutu guru sudah relatif baik bisa diberikan otonomi luas. Pemerintah juga bisa memberikan otonomi kepada sekolah yang telah memenuhi standar akreditasi. Pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum.

Terhadap daerah yang belum memenuhi hal itu, pemerintah pusat masih harus melakukan tugas-tugas penempatan guru, asistensi penyusunan kurikulum, dan peningkatan mutu guru serta sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong atau memberikan insentif kepada sekolah-sekolah yang bermutu di satu daerah untuk mengembangkan *sister school* di daerah lain.

Asimetris

Dengan kebijakan dasar yang bersifat asimetris tersebut, pemerintah diharapkan menjadi generator pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus mengurangi disparitas antardaerah yang terlalu *njomplang*. Dengan kebijakan yang lebih tepat, pendidikan akan melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan optimal.

Pandemi Covid-19 yang berlarut-larut seharusnya dijadikan momentum untuk pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat, untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Agar secara struktural dan kultural, bangsa ini memiliki ketangguhan kolektif dalam menghadapi dinamika apapun di masa depan. □

**)Dr Suharno MSi Pengajar*

Kebijakan Publik di FIS dan Program Pascasarjana UNY, Wakil Ketua ICMI Kabupaten Sleman.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi akan menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisik subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menjadikan Prokes sebagai Pandemi Sosial

PANDEMI Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 500.000 ribu kasus aktif. Di tengah peningkatan kasus aktif yang begitu cepat, muncul kekhawatiran akan terjadinya *pandemic fatigue* di tengah masyarakat.

Menurut WHO (2020), *pandemic fatigue* atau kelelahan akan pandemi adalah kondisi seseorang yang lelah akan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi. Sehingga mulai abai terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Kelelahan akan pandemi ini berbahaya. Karena masyarakat menjadi semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah, kurang responsif terhadap pesan yang disampaikan. Serta mulai abai dan kurang peduli terhadap protokol kesehatan (prokes).

Gesekan

Tanda-tanda *pandemic fatigue* tercermin dalam situasi PPKM Darurat saat ini. Contoh terbaru, terjadi gesekan antara masyarakat dengan aparat. Di berbagai tempat, gesekan tersebut juga diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan dalam penegakan aturan PPKM Darurat yang dilakukan oknum aparat. Kejadian-kejadian tersebut tentu memunculkan sebuah pertanyaan: pendekatan seperti apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah dan aparat ditengah situasi *pandemic fatigue*?

Pada dasarnya, pemerintah mengharapkan perubahan-perubahan yang bertahap dan beraturan. Dalam konteks pandemi Covid-19, saat himbauan untuk melakukan prokes muncul, pemerintah berharap bahwa hal tersebut bisa dilakukan masyarakat. Kenyataannya tidak demikian. Sebagai hal baru, masyarakat tidak pernah benar-benar tahu mengenai virus ini. Juga belum mema-

Fernandito Dicky M

hami bagaimana prokes harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Situasi ini diperburuk dengan menjamurnya berita hoaks dan munculnya klaim-klaim sepihak yang membuat masyarakat kalut.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan adaptasi new normal dengan melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi). Namun demikian, ajakan tersebut diwarnai dengan komunikasi publik yang tidak terkoordinasi dan minim empati. Bahkan pada praktiknya pendekatan yang digunakan acapkali merupakan pendekatan yang represif.

Dalam situasi ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan ruang kepercayaan bahwa masyarakat bisa melakukan prokes dan mampu menjadi agen dalam memutus rantai penyebaran virus. Komunikasi publik dan pendekatan yang dilakukan perlu mengedepankan empati dan rasa kemanusiaan. Pemerintah perlu memiliki keyakinan bahwa perubahan sosial selalu mungkin, bahwa masyarakat dapat mengubah perilaku dan keyakinan mereka begitu menemukan dorongan yang tepat.

Komunikasi Publik

Pemerintah perlu menyadari betapa mudahnya masyarakat terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengar. Juga betapa peka masyarakat, bahkan terhadap kejadian-kejadian paling kecil dalam

kehidupan sehari-hari. Karenanya, *mindset* yang perlu dibangun pemerintah adalah membuat prokes menjadi epidemi sosial. Daripada memandang masyarakat sebagai sebuah objek, pemerintah perlu memandang masyarakat sebagai subjek. Lakukanlah komunikasi publik yang tepat, penuh empati, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta gunakanlah pendekatan yang humanis.

Dengan memposisikan masyarakat menjadi subjek, akan membuat masyarakat menyebarkan *evirus* kebaikan dengan cara *gethok tular* ke masyarakat lainnya secara radikal. Prokes akan mudah dilakukan apabila masyarakat mudah beradaptasi dan menangkap pesan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu berposisi sebagai institusi yang bijak. Dan aparat yang bekerja di lapangan berposisi menjadi penghubung dengan memberikan teladan dan tindakan yang humanis. Hal demikian akan membuat prokes menjadi sebuah epidemi sosial. □

**)Fernandito Dicky Marsetyo,*

Staf Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada.

Pojok KR

Pemda DIY tambah nakes pendamping isoman. -- Lebih cepat lebih baik.

Pelaku bisnis berharap PPKM berakhir. -- Berharap pula masyarakat taat prokes.

DIY targetkan vaksinasi 20.000 perhari. -- Semua pihak dituntut proaktif.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Memelihara Kesehatan Mental

KASUS positif Covid-19 di 33 Provinsi pada 16 Juli 2021 telah mencapai penambahan kasus sebesar 54.000 orang. Total jumlah pasien positif sebesar 2.780.803 orang, dan telah mengalami kesembuhan sebesar 2.204.491 orang dan yang telah meninggal dunia 71.397 orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan nasional atas semakin meningkatnya wabah Covid-19 sehingga memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan cermat khususnya dalam penanganan kesehatan mental masyarakat, agar tidak terjadi korban yang lebih banyak.

Menurut Profesor Cherie Armour (Queen University Belfast) dalam Covid-19 and Mental Health Using What We Know to Allow Us to Adapt, kondisi pandemi sangat meningkatkan risiko penekanan kondisi mental masyarakat sehingga mampu menurunkan daya imunitas tubuh manusia. Kondisi ini juga memicu rasa cemas dan peningkatan frustrasi yang tinggi pada seseorang yang mengakibatkan gangguan psikis yang berdampak pada kinerja bagian vital tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung yang mulai semakin melemah. Hal ini menyebabkan kesulitan tubuh untuk membentuk antibodi secara alami dan dapat menimbulkan kematian secara mendadak.

Sian Beilock (The University of Chicago) menyatakan, melemahnya kesehatan mental juga dipengaruhi oleh adanya penekanan aktivitas sosial dan pembatasan aksesibilitas spiritual dalam

memenuhi kebutuhan jiwa seseorang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hidup secara soliter dan membentuk karakter apatis serta individualistik. Selanjutnya, dengan merebaknya informasi hoaks yang terkait Covid-19 melalui media sosial juga telah meningkatkan kecemasan sosial yang berdampak pada kesehatan mental masyarakat.

Solusi dari kondisi ini adalah membangun komunikasi yang sehat melalui digital platform disesuaikan dengan kondisi masyarakat beserta pelibatan semua pihak secara proporsional. Selanjutnya membuat kegiatan edukasi yang positif terkait Covid-19 beserta pemberian bantuan layanan kesehatan yang tepat guna, serta pembukaan rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini akan mampu meningkatkan kondisi mental masyarakat semakin membaik.

Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai pelindung, pemakmur, dan pembangunan ketertiban umum di masyarakat. Untuk itu hendaknya lebih arif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan dan edukasi melalui konstitusi resmi dengan menyingkirkan arogansi, persekusi, dan intimidasi pada masyarakat akar rumput. Membangun sinergitas dengan tokoh agama dan masyarakat akan mampu secara bersama melawan badai pandemi Covid-19 di negeri ini. □

*Eko Prasetyo Spd ESP MPd
Guru di Madrasah
Muallimin Muhammadiyah
Yogya.*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo S.Sos.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Waki. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry23@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%